



dr. Mirna Annisa, M.Si
Bupati Kendal



INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016



Masrur Masykur
Wakil Bupati Kendal

I. PENDAHULUAN

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, menegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 148);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 5 Seri E No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 No. 9 Seri A No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 160);

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

a. Letak Geografis Daerah

Kabupaten Kendal secara geografis berada di Jalur Pantai Utara Pulau Jawa, dengan letak diantara $109^{\circ} 40' - 110^{\circ} 18'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 32' - 7^{\circ} 24'$ Lintang Selatan.

b. Batas Administrasi Daerah

Secara administratif Kabupaten Kendal terbagi menjadi 20 kecamatan, 20 kelurahan dan 266 desa. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang.

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Kendal $1.002,23 \text{ km}^2$ terdiri atas tanah sawah seluas $259,64 \text{ km}^2$, tanah pekarangan $210,74 \text{ km}^2$, tanah tegalan $203,13 \text{ km}^2$, perkebunan $78,65 \text{ km}^2$, hutan $157,21 \text{ km}^2$, dan lahan untuk lain-lain (perumahan, fasilitas umum, industri, dsb) seluas $92,86 \text{ km}^2$.

d. Kondisi Topografi.

Kondisi Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis, yaitu : daerah pegunungan yang terletak di bagian selatan dengan ketinggian sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 25°C . Daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27°C . Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dalam wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 697 m dpl. Begitu pula dengan Kecamatan Sukorejo dengan ketinggian 524 m dpl. Sedangkan Kecamatan Kaliwungu adalah kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut, dengan ketinggian 22 m dpl.

2. Kondisi Demografis.

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal sebanyak 961.989 jiwa, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 485.754 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 476.235 jiwa.

3. Kondisi Ekonomi.

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Bidang Pertanian

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kendal, sangat strategis untuk menopang sektor pertanian. Beberapa komoditi pertanian yang jumlah produksinya mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2015, diantaranya : (1) Kopi naik dari 1.082,07 ton menjadi 3.854,65 ton (256,23%), (2) Coklat naik dari 123,85 ton menjadi

198,54 ton (37,62%), (3) Jambu biji merah naik dari 15.939,80 ton menjadi 22.554,8 ton (29,33%), (4) Bawang Merah naik dari 25.499,30 ton menjadi 32.093,60 ton (20,55%), (5) Jagung naik dari 209.032 ton menjadi 225.505 ton (7,30%).

2) Bidang Peternakan

Potensi sektor peternakan di Kabupaten Kendal sangat mendukung pengembangan ekonomi masyarakat dan kebutuhan pasar baik lokal maupun nasional. Adapun populasi produk unggulan peternakan yang jumlahnya meningkat dibanding Tahun 2015, antara lain Ayam Ras Petelur naik dari 3.025.102 ekor menjadi 3.799.915 ekor (20,39%), dan Ayam Ras Pedaging naik dari 8.190.231 ekor menjadi 8.587.800 ekor (4,63%).

3) Bidang Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kendal memiliki potensi kelautan yang besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Wilayah perairan pantai utara Jawa di Kabupaten Kendal sepanjang ± 42,4 kilometer, menjadi potensi untuk dikelola melalui sistem perikanan tangkap maupun budidaya. Beberapa potensi unggulan di bidang kelautan dan perikanan, antara lain : (1) Perikanan Tangkap dengan jumlah produksi pada Tahun 2016 sebanyak 3.086.445 kg, atau meningkat 166% dari produksi Tahun 2015 yang mencapai 1.858.904 kg. (2) Budidaya Ikan Tambak yang berada di 7 (tujuh) kecamatan, mencapai produksi sebanyak 21.184.585 kg, atau meningkat sebesar 5,3% dari produksi tahun 2015 sebanyak 20.112.697 kg. (3) Budidaya Ikan Air Tawar, dengan hasil produksi 1.932.208 kg atau meningkat sebesar 4, 2% dari produksi Tahun 2015 dengan hasil produksi sebanyak 1.854.399 kg.

4) Bidang Pariwisata

Kabupaten Kendal memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan dapat dikembangkan menjadi obyek wisata. Tolak ukur keberhasilan di bidang kepariwisataan, salah satunya ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung Tahun 2016 mencapai sebanyak 159.721 orang, atau meningkat sebesar 10% dari jumlah pengunjung pada tahun 2015 yang mencapai 145.187 orang.

b. Pertumbuhan Ekonomi

1) Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung atas dasar harga konstan, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi cenderung stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,17%.

2) Laju Inflasi

Laju inflasi pada Tahun 2016 sebesar 2,47 %, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 4,13 %.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Visi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, yaitu “Terwujudnya Kemajuan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal Yang Merata Berkeadilan Didukung Oleh Kinerja Aparatur Pemerintahan Yang Amanah Dan Profesional Serta

Berakhlak Mulia, Berdasarkan Iman Dan Taqwa Kepada Allah SWT“. (Aparatur Amanah Masyarakat Maju Sejahtera)

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi pembangunan, yaitu

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif – efisien, bersih, bebas KKN;
2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan;
4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berdasarkan nasionalisme;
5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal;
6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya;
7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama;
8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja.

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi pembangunan dan arah kebijakan tahun 2016 “Kendal Manis Bersatu”, telah direncanakan program prioritas daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 yaitu : *Pertama* : Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan peran puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelaksanaan BPJS bagi seluruh penduduk di Kabupaten Kendal dalam pemeliharaan kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta perbaikan gizi pada 1 tahun usia bayi, mencegah bayi *stunting* (pendek). *Kedua* : Meningkatkan masyarakat yang cerdas melalui perwujudan pendidikan 9 tahun, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan, implementasi kartu Indonesia Pintar. *Ketiga* : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat berwirausaha. *Keempat* : Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah. *Kelima* : Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat. *Keenam* : Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan. *Ketujuh* : Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. *Kedelapan* : Peningkatan kualitas ketenagakerjaan. *Kesembilan* : Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah.

Selanjutnya prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, dipertajam dalam Perubahan RKPD Tahun 2016, yaitu : *Pertama* : Perbaikan infrastruktur terutama jalan dan jembatan, *Kedua* : Penataan wajah Kabupaten Kendal dengan pembangunan dan rehabilitasi taman Kota, *Ketiga* : Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016, *Keempat* : Penataan pemukiman menuju *universal access*, drainase dan pengendalian banjir. *Kelima* : Persiapan penataan fasilitas kesehatan terutama kualitas puskesmas perawatan. *Keenam* : Pengembangan industri rumahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan.

III. URUSAN DESENTRALISASI

Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah diukur dari capaian kinerja mulai dari input, proses, output dan outcome dari perencanaan yang sudah ditetapkan. Indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD menjadi target bagi SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah menjadi pedoman bagi SKPD dalam penentuan target kinerja. Indikator dan target kinerja dalam RPJMD ini menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Capaian penyelenggaraan urusan desentralisasi yang telah memenuhi target, diantara sebagai berikut :

Urusan	SKPD Pelaksana	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016
Pendidikan	Dinas Pendidikan	1	Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan pendidikan dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/Paket A	%	103,15	108,04
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	98,90	99,22
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	61,00	62,76
				Rasio Guru/Siswa SMP	Angka	0,059	0,059
		2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dasar	Persentase Ruang Kelas SD Kondisi Baik	%	61,30	69,61
				Persentase Ruang Kelas SMP Kondisi Baik	%	69,71	77,77
		3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal Meningkatnya karakter dan budi pekerti peserta didik Terwujudnya ekosistem pendidikan yang kondusif Terwujudnya data pendidikan yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Rata-rata Ujian Sekolah Siswa SD	Angka	74,55	74,61
				Persentase PKBM Memiliki Akreditasi	%	30	35
				Persentase LKP Memiliki Akreditasi	%	20,51	21,05
				Persentase Penduduk Usia 15 – 60 Tahun Melek Huruf	%	96,58	96,61
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4–6 Tahun	%	55,00	60,2
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0–6 Tahun	%	40,00	43,84
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/MTs	%	100	100
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/ MA	%	88,45	90,49
		4	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Pendidik SMP Memiliki Sertifikasi	%	57,80	59,92
		5	Terwujudnya ekosistem pendidikan yang kondusif	Persentase Sekolah Sehat Jenjang SD	%	1,57	1,57
				Persentase Sekolah Sehat Jenjang SMP	%	8,82	8,82
		6	Terwujudnya data yang berkualitas dan akuntabel	Ketersediaan Buku Profil Pendidikan	Angka	1	1
Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	%	80	100
		2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan	%	100	100

				setingkat			
				Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas	12	12
		3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM / P-IRT)	%	64	70
		4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	80	85
				Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	%	40	100
		5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100
				Asi Eksklusif untuk bayi 0 – 6bln	%	42	43,14
		6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan penggunaan air bersih	%	80,73	87,35
				Cakupan Rumah sehat	%	64	67,03
		7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100
				Prosentase angka kasus HIV yang diobati (SUFA)	%	50	99,1
				Prosentase puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan tata laksana pnemonia melalui program MTBS	%	100	100
				Prosentase puskesmas yang melakukan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko	%	100	100
				Persentase KLB dapat ditangani < 24 jam	%	100	100
				Acute Flaccid Paralysis (AFP)	Per 100.000 pddk	< 2	2
		8	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100
		9	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di faskes	%	80	96,76
				Cakupan kunjungan bayi	%	97	105,4
				Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	94	95,77
				Cakupan penduduk memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Universal Total Coverage)	%	65	100
Lingkung-an Hidup	RSUD dr. H. Soewondo	1	Program pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru/mata	Pelayanan terhadap gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	%	100	100
		2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	- AVLOS	hari	3,50	3,50
				- TOI	kali	1	1
				- BTO	kali	50	50
				- IKM	nilai	80	80
		1	Program pengendalian pencemaran dan perusak lingkungan hidup	Kualitas baku mutu air	titik	29	105
		2	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL	%	13	13
				Persentase luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan	%	42,17	42,17

				diinformasikan status kerusakannya			
				Kegiatan penegakan hukum lingkungan	usaha	13	26
		3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan/Pertamanan	Jumlah masyarakat pengelolaan sampah dibina	orang	150	750
		6	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah masyarakat di lingkungan industri tembakau yang dibina	orang	45	90
		7	Program perlindungan dan konservasi SDA	Lahan kritis yang tertangani	Ha	0	0
				Indeks kualitas lingkungan hidup	skor	50,48	50,48
Pekerja- an Umum	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Energi Sumber Daya Mineral	1	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Persentase saluran drainase/gorong-gorong berkondisi baik	%	40,39	40,39
		2	Program Pembangunan turap/talud/ bronjong	Persentase Turap/Talud/Bronjong berkondisi baik	%	10	10
		3	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Tersedianya dokumen inspeksi jalan dan jembatan	%	100	100
		4	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	%	62,46	63,3
		5	Program Pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Tersediannya data base jalan dan jembatan yang up to date	%	100	100
		6	Program peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	75	75
		7	Program pembangunan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah kegiatan konservasi	%	9	9
		8	Program pengendalian Banjir	Menurunnya luasan genangan di daerah rawan banjir	Ha	35	35
		9	Program Penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi	%	10	10
		10	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah kegiatan konservasi	keg	9	9
Penataan Ruang	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	1	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Persentase saluran drainase/gorong-gorong berkondisi baik	%	42,19	42,19
				presentase cakupan pelayanan drainase lingkungan	%	69	69
		2	Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio tempat Pemakaman dengan satuan penduduk	%	2	2
		3	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan.	%	2	2
		4	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	%	10	10
		5	Program peningkatan sarana dan prasarana umum	Persentase ketersediaan sarana prasarana umum	%	5	5
		6	Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan	Persentase permukiman yang dilengkapi prasarana permukiman berkualitas	%	3,00	3,00
Perencana an Pembangu nan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	tersedianya data teknis koordinasi Bidang Ekonomi	dokum en	6	6
		2	Program Perencanaan Pembangunan Sosial	tersedianya data teknis koordinasi Bidang	dokum en	11	11

			Budaya	Pemerintahan Sosial Budaya			
		3	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	tersedianya data teknis koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana	dokum en	7	7
		4	Program Kerjasama Pembangunan	tersusunnya konsep perencanaan kerjasama pembangunan	dokum en	1	1
		5	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	tersusunnya konsep Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	dokum en	2	2
		6	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	tersusunnya konsep Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	dokum en	2	2
		7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	dokum en	32	32
				Persentase SKPD yang melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan tepat waktu	%	100	100
				Persentase paket kegiatan pengadaan barang/jasa lewat ULP	%	100	100
		8	Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah	tersusunnya konsep pengembangan dan fasilitasi IPTEK, inovasi daerah	dokum en	3	3
		9	Program Pengembangan Data/ Informasi	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan	dokum en	6	6
Perumah- an	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	1	Program pengembangan perumahan	cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	96,3	95,96
		2	Program lingkungan sehat perumahan	% kawasan permukiman kumuh	%	1,18	1,18
Kepemuda an dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Jumlah Kegiatan kepemudaan	Keg	8	8
		2	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Organisasi pemuda yang dibina	kelom pok	13	15
		3	Program peningkatan upaya penumbuh kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah Organisasi pemuda yang mampu berwirausaha	orang	10	10
		4	Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga	Jumlah Organisasi olahraga yang dibina	cabor	29	32
		6	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah club olahraga	klub	60	65
				Jumlah gedung olahraga	unit	7	7
				Jumlah atlet berprestasi	orang	57	70
Penanam- an Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1	Proram Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Sektor	5	5
		2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kecepatan pelayanan perizinan	Hari	7	7
		3	Program potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah	Peta potensi Investasi Kabupaten Kendal	Doku men	1	1
				Nilai Investasi	Trilyu n (Rp)	1	1.03
Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah wirausaha baru mikro dan kecil	orang	33.197	33.216
				Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	unit	1.278	1.285
		2	Program Pengembangan	Jumlah UMKM yang	unit	55	65

			Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	mengikuti pameran			
		3	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi sehat	%	70	94,87
				Persentase Koperasi aktif	%	71,4	71,9
				Jumlah Pertumbuhan koperasi	unit	589	591
		4	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Jumlah produk unggulan daerah (PUD) yang menjadi OVOP	unit	5	5
Kependu- dukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber- KTP	%	80	90,75
				Rasio Pasangan berakte nikah	%	3	6,21
Ketenaga- kerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100
				Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	80	91
				Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	66,67	70,31
				Prosentase lembaga pelatihan kerja swasta yang terbina	%	46,51	59,38
				Jumlah lembaga pelatihan kerja yang berijin	LPK	10	32
		2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan	%	71,87	73,77
		3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Keselamatan dan perlindungan kerja	%	91,86	93,01
				Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagaker-jaan dan Kesehatan	%	75	76
				Prosentase Pemeriksaan Perusahaan	%	81,4	82,97
				Prosentase Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	40,78	71,36
Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Ketersediaan Pangan Utama/ Beras	%	167	171,79
				Penguatan Cadangan Pangan	%	25	27,42
				Stabilitas Harga dan Pasokan	%	100	100
				Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah	%	70	70
				Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	42,8	42,8
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	81,5	82,1
				Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	83,5	83,5
		2	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase Jumlah Produk Olahan Unggulan Lokal yang dipamerkan	%	53,4	53,4
		3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kelompok tani yang dibina keterampilannya	%	6	10,3
		4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Persentase kelompok tani yang dibina keterampilan penerapan teknologi pertanian	%	0,5	0,65
		5	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase KTH yang dibina rehabilitasi hutan dan lahan	%	2,4	2,44
Pemberda- yaan Perempu-	Badan Pemberdayaan Perempuan dan	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan	Persentase Kelembagaan PUG yang aktif	%	30,43	36,58

an dan Perlindu- ngan Anak dan Keluarga Berencana	Keluarga Berencana		Gender dan Anak				
		2	Program Kesorasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	%	3,85	3,86
		3	Program Peningkatan Persentase dan Kesetaraan Gender dan Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,91	50,97
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga Legislatif	%	22,22	22,22
				Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	%	1,01	1,01
		4	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Rasio KDRT dan anak	%	0,04	0,03
				Cakupan Pengelola Industri rumahan (IR) yang mendapatkan pelatihan keterampilan	%	21,62	22,38
Perhubun- gan	Dinas Perhubungan	1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase SKPD yang melakukan pelaporan pembangunan tepat waktu	%	83	85
				Prosentase paket kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan	%	92	96
Komunika- si dan Informati- ka	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah	unit	11	11
		2	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah sumberdaya aparatur SKPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan TIK dan e- government	orang	59	59
		3	Program kerjasama informasi dengan media massa	Persentase SKPD yang menyampaikan informasi publik secara lengkap	%	14	14
				Sarana komunikasi (Media Massa, Media Interpersonal, Media Luar ruang, Media Tradisional dan Media Online)	Jenis	6	6
		4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Hotspot yang tersedia	titik	11	11
				Persentase SKPD memiliki Akses layanan Internet menggunakan FO	titik	1	1
				Koneksi Point to Point (PTP) wireless ke UPTD Teknis di Kab. Kendal	titik	6	6
				Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	bh	12	12
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.	Jumlah anggota masyarakat yang mendapatkan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	%	2.635 orang	2.635 orang
		2	Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan nasional di masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	%	5 kelompok	5 kelompok
		3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik yang demokratis	Kegiatan pembinaan politik daerah	%	26 Keg	26 keg
				LSM dan Ormas aktif	%	75 kelompok	76 kelompok
Otonomi Daerah, Pemerinta- han	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	1.	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa yang di bina	desa	19	19

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian		2.	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan Prosedur pengawasan	Terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang Akuntabel	dokumen	3	3
		3.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Produk Kerjasama Daerah	Produk Kerjasama Daerah	7	20
		4.	Program Pengembangan Data Informasi	Jumlah data Apartur Desa yang diperbaharui	desa	60	60
	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	1.	Program penataan Peraturan Perundang-undangan	jumlah raperda yang masuk dalam propemperda	buah	10	10
	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	1	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundangan tentang penataan kelembagaan	unit	30	30
				Prosentase aparatur yang ditingkatkan kompetensinya	%	17	19
		2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	50	50
				Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Kendal komponen pelaporan kinerja	%	8,25	8,25
				Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	%	65	65
				% SKPD yang bernilai IKM baik	%	80	80
				% Pelaksanaan Urusan Sesuai SPM yang telah diterbitkan	%	100	100
	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pusat dan Provinsi	%	100	100
	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)	1	Peningkatan tertib pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi penyerapan anggaran	Menurunnya SKPD yang terlambat dalam melaksanakan kegiatan diukur dari penyerapan anggaran	%	70	83
		2	Peningkatan SDM aparatur guna menunjang pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah.	Terlaksana kompetensi SDM yang menunjang pengadaan barang / jasa pemerintah	%	30	30
	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam)	1.	Program Pengembangan Perekonomian Daerah	Inflasi	%	4,9	2,47
				Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	10	10,9
	Sekretariat DPRD	1.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Perda yang dibahas dan ditetapkan.	buah	15	17
		2.	Program Kehumasan	Jumlah publikasi kegiatan DPRD	kegiatan	25	25
		3.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kajian Peraturan Daerah	buku	1	1
	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	%	20	20,00
				Rasio SILPA thdp Jumlah Pendapatan	%	20	20,00
				Meningkatnya pendapatan pajak daerah (Peningkatan PAD)	%	16	33,00

	Inspektorat	1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	Level	1	1
				Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	2
		2.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa yang telah mengikuti Diklat penjenjangan Auditor/P2UPD	%	100	100
		3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yang melaporkan Harta Kekayaannya	%	100	100
	Badan Kepegawaian Daerah	1	Program peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah jenis pelayanan berbasis teknologi informasi	Jenis	8	10
		2	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	100	100
	Satpol PP	1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100
		2	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	220	220
		3	Meningkatkan cakupan penegakan Perda	Cakupan aduan penegakan Perda yang ditindaklanjuti	%	100	100
		4	meningkatkan pembinaan Linmas	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	%	140	140
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang, kesiapsiagaan dan upaya pengurangan resiko bencana	jumlah desa/kelurahan tangguh bencana	%	2	2,00
				jumlah sekolah siaga bencana	%	2	2,00
				Cakupan Kejadian Bencana yang tertangani	%	100	400,00
				Cakupan Korban Terdampak Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	400,00
		2	Tersusunya pedoman, aturan / dasar hukum operasional, dan saluran informasi publik tentang bencana	Tersedianya dokumen/data dasar/aturan perencanaan & penanggulangan bencana	%	4	4,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1	Program peningkatan Pemberdayaan masyarakat pedesaan	Prosentase PKK Aktif	%	100	100
				Prosentase posyandu aktif	%	100	100
				Jumlah lembaga kemasyarakatan desa /kelurahan yang aktif	lembaga	286	286
				Jumlah kelompok BP SPAM yang dibina	kelompok	89	89
				Jumlah kerjasama antar desa	buah	17	17
		2	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Prosentase lembaga keuangan mikro yang aktif	%	28	28
				Prosentase BUMDes yang terbentuk	%	3	3
				Prosentase posyandu aktif	%	2	2
		3	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase swadaya masyarakat terhadap jumlah anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat beserta pelestarian yang dikucurkan	%	7	7
		4	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa /kelurahan yang memiliki profil potensi desa /kelurahan	Desa/ Kel	275	275

				Jumlah desa yang memiliki RPJMDes, APBDes dan RKPDDes	desa	266	266
Sosial	Dinas Sosial	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS	Persentase Fakir miskin yang mendapat perlindungan sosial (SPM baru)	%	100	100
				Persentase fakir miskin yang dapat akses terhadap layanan rujukan terpadu (SPM baru)	%	50 Desa/ 17,4	50 Desa/ 17,4
		2	Program Pelayanan dan Rehabsos	Persentase warga migran kortan tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Kab. Kendal ke daerah asal (SPM Baru)	%	100	100
				Persentase anak yang dapat layanan rehabsos luar lembaga (SPM Baru)	%	40	40
				Persentase Tuna Sosial yang dapat layanan rehabsos (SPM Baru)	%	7	7
		3	Program pembinaan anak terlantar	Persentase pembinaan anak terlantar yang tertangani	%	4,5	4,5
				Persentase anak terlantar yang dapat perlindungan dan jaminan (SPM Baru)	%	100	100
		4	Program Pembinaan anak cacat dan trauma	Persentase pembinaan anak cacat dan trauma yang tertangani	%	100	100
		5	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	%	7	7
		6	Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Persentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani	%	100	100
				Persentase korban bencana (alam dan sosial) yang dapat kebutuhan dasar saat tanggap darurat	%	100	100
Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	Program pengembangan Nilai Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	75	85
		2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Misi Kesenian	%	75	75
				Jumlah grup kesenian	kelompok	550	563
				Cakupan Kajian Seni	%	60	75
				Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	50	80
				Cakupan Organisasi seni	%	80	90
Perpustakaan Dan Kearsipan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pengelolaan arsip dinamis dan statis	berkas	1.600	1.600
		2	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah arsip inaktif dan statis terpelihara	%	3,09	4,05
		3	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	Buku	26.770	28.270
				Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	15.092	17.557
Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya (kg)	kg	22.883.000	23.116.793
				Tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (%)	kelompok	5,00	5
				Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (klp)	kelompok	10	10
		2	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi	Produksi perikanan tangkap (kg)	kg	2.096.288	3.086.445
				Persentase Tempat	%	20	20

			Perikanan	Pelelangan Ikan (TPI) dalam kondisi baik (%)			
				Cakupan bina kelompok nelayan (klp)	kelompok	10	10
Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	1	Program Peningkatan kesejahteraan petani	Cakupan Bina kelompok petani	Kel	69	70
		2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Cakupan Bina kelompok petani	Kelompok	69	26
Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Obyek wisata unggulan	obyek	9	9
		2	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,56	0,56
Industri dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang	%	0,25	0,44
				Persentase IKM memiliki izin usaha industri kecil melalui P-IRT	%	12,42	12,58
				Persentase IKM Memiliki izin usaha industri kecil melalui sertifikat halal	%	0,33	0,33
		2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	0,66	0,73
		3	Program Penataan Struktur Industri	Persentase industri yang berkembang	%	99	99
Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	KK	10	10
		2	Program Pengembangan wilayah transmigrasi	Prosentase Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	%	83,33	100

IV. TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal pada Tahun 2016, antara lain :

No	Program/Kegiatan	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SKPD Pelaksana
1.	Program Bina Pembangunan Daerah, Pembinaan, Penyelenggaraan Dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Kementrian Dalam Negeri	145.692.000	140.876.125	
2.	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya (TP)	Kementrian Kelautan dan Perikanan			Dinas Kelautan dan Perikanan
	a. Kegiatan Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan		57.750.000	56.314.000	
	b. Kegiatan Pengelolaan kawasan perikanan budidaya		42.500.000	32.000.000	
	c. Kegiatan Pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan		286.490.000	284.464.900	

	d. Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya		93.570.000	90.232.400	
3.	Pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu	Kementerian Dalam Negeri	1.935.304.100	1.837.359.700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas Pembantuan yang diberikan pemerintah kabupaten kepada desa pada Tahun 2016 meliputi penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak, dimana dari aspek pembiayaan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

Pemilihan Kepala Desa serentak dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2016 dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 3.216.600.000,00 dan telah direalisasikan/disalurkan 100%.

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kerjasama Antar Daerah KEDUNGSAPUR
2. Perjanjian Kerjasama Dinas Pengadaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, Dinas Bina Marga SDA, E, SDMin Kabupaten Kendal dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumberdaya Air Di Wilayah Sungai Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah
3. Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang, Bupati Kendal, Bupati Temanggung dan Bupati Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Bodri Kuto
4. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Pemerintah Kabupaten Kendal tentang Peningkatan Daya Saing Daerah
5. Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah, Walikota Semarang, Bupati Kendal dengan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang tentang Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan Melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
6. Kesepakatan Bersama Bupati Kendal, Bupati Demak, Bupati Semarang, Walikota Salatiga, Walikota Semarang, Bupati Grobogan tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Di Wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Searang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan
7. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Kendal tentang Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antar Kota Semarang Dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

1. Kesepakatan Bersama Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tentang Proyek Pengembangan Industri Rumahan Bagi Perempuan di Kabupaten Kendal.

2. Kesepakatan Bersama Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang dan Pemerintah Kabupaten Kendal tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal.
3. Kesepakatan Bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kendal tentang Penggunaan Sistem Informasi Kredit Progam (SIKP).
4. Kesepakatan Bersama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia Semarang dan Pemerintah Kabupaten Kendal tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Kepariwisataaan di Kabupaten Kendal.
5. Kesepakatan Bersama Universitas Semarang dan Pemerintah Kabupaten Kendal tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Kendal.
6. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Pemerintah Kabupaten Kendal tentang Peningkatan Daya Saing Daerah.
7. Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah, Walikota Semarang, Bupati Kendal dengan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang tentang Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Nota Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
9. Nota Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
10. Nota Kesepahaman Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dengan Bupati Kendal tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dari Pegawai Tidak Tetap Pusat.
11. Kesepakatan Bersama Universitas Diponegoro Pemerintah Kabupaten Kendal tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kabupaten Kendal.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dalam rangka meningkatkan sinergitas antar lembaga dan Instansi Vertikal, Pemerintah Kabupaten Kendal telah melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah. Koordinasi dan kerjasama dimaksudkan untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif, stabilitas maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan baik dalam format KOMINDA (Komunitas Intelegen Daerah), Rapat membahas masalah aktual dan urgen maupun pengawasan orang asing.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Bencana yang terjadi pada tahun 2016, yaitu : Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung dan Kebakaran. Dalam upaya penanggulangan bencana alam yang terjadi, maka Pemerintah Kabupaten Kendal telah melaksanakan beberapa langkah-langkah penanganan berupa Pembuatan Jembatan Darurat Kali Bodri di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo, Perbaikan Jembatan Jalan Sidomukti Kecamatan Weleri-Kebongembong Kecamatan Pageruyung, Perbaikan Saluran Irigasi Wangan Blawong Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung. Sedangkan upaya pencegahan yang dilakukan meliputi sosialisasi, pendirian Posko Siaga Bencana, inventarisasi dan identifikasi daerah rawan bencana, pembuatan peta lokasi rawan

bencana, serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka penanggulangan bencana.

E. Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Selama tahun 2016, masih terdapat beberapa gangguan yang terjadi terhadap ketertiban dan ketenteraman umum di Kabupaten Kendal. Gangguan terjadi masih berkisar pada penyakit masyarakat seperti peredaran minuman keras, gangguan lingkungan, prostitusi, PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Telantar), pelanggaran Pedagang Kaki Lima, maupun beredarnya cukai rokok ilegal. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam rangka pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban dan ketenteraman umum meliputi : meningkatkan patroli wilayah, peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan dan trantib kecamatan, penguatan kelembagaan Satlinmas, serta melakukan operasi dalam rangka penegakan peraturan daerah.

F. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat strategis

- 1) Peresmian Pengoperasian Penyeberangan Lintas Kendal-Karimunjawa yang sebelumnya didahului dengan dioperasikannya pelabuhan penyeberangan Kendal-Kumai di Pelabuhan Kendal.
- 2) Peresmian Kawasan Industri Kendal (KIK) oleh Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura, dengan momentum tersebut diharapkan dapat mengangkat perekonomian Kabupaten Kendal.

Selain pembangunan yang bersifat strategis, pada tahun 2016 Kabupaten Kendal juga telah menorehkan beberapa prestasi dan penghargaan di tingkat nasional maupun internasional, antara lain Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan Kategori Lalu Lintas Untuk Kota Kecil, Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) memperoleh Juara III Tingkat Nasional, Penghargaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atas upaya Kabupaten Kendal dalam membina dan mengembangkan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia, serta sejumlah prestasi tingkat nasional dan internasional di bidang olahraga.

VI. PENUTUP

Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD, sehingga segala keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan peningkatan daya saing daerah tentunya tidak lepas dari peran berbagai pihak. Termasuk segala kekurangan dan dinamikanya akan menjadi catatan dan evaluasi guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa meridhoi setiap niat dan usaha kita untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal yang merata dan berkeadilan. Amin.

BUPATI KENDAL

dr. MIRNA ANNISA, M.Si